

**KEPENTINGAN INDONESIA MELALUI KETERLIBATAN *FORMED
POLICE UNIT (FPU) INDONESIA* DALAM MISI *UNITED NATIONS
AFRICAN MISSION IN DARFUR (UNAMID)* PADA 2015-2020**

(Skripsi)

Oleh

SALSABILLA SASTRA

1616071015



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEPENTINGAN INDONESIA MELALUI KETERLIBATAN *FORMED POLICE UNIT (FPU)* INDONESIA DALAM MISI *UNITED NATIONS AFRICAN MISSION IN DARFUR (UNAMID)* PADA 2015-2020

Oleh

SALSABILLA SASTRA

Konflik Darfur yang terjadi pada 2003 membuat Uni Afrika dan PBB membentuk sebuah misi perdamaian gabungan yang dinamakan *United Nations African Mission in Darfur (UNAMID)*. Indonesia turut serta terlibat dengan menyebarkan pasukan perdamaianya yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan *Formed Police Unit* Indonesia. Penulis meneliti mengenai kepentingan Indonesia melalui keterlibatan FPU Indonesia pada misi UNAMID periode 2015-2020. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keterlibatan FPU Indonesia pada misi UNAMID dan mendeskripsikan kepentingan Indonesia melalui keterlibatan FPU Indonesia di misi UNAMID pada tahun 2015-2020 dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional untuk menganalisis data primer melalui wawancara dengan Kasubbagmonev Bagdamkeman Romisinter Divhubinter Polri dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif Miles dan Hubberman yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepentingan Indonesia melalui keterlibatan FPU Indonesia di misi UNAMID pada periode 2015-2020 merupakan salah satu bentuk perwujudan doktrin yang dianut Indonesia yaitu UUD 1945 alinea 4. Selain itu hal ini sebagai upaya untuk mencapai target menjadi salah satu dari 10 negara penyumbang pasukan terbesar dalam misi PBB dan strategi untuk maju dalam pemilihan calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kata kunci : Kepentingan Indonesia, FPU Indonesia, UNAMID.

ABSTRACT

THE INDONESIA'S NATIONAL INTERESTS THROUGH THE INVOLVEMENT OF THE *FORMED POLICE UNIT (FPU)* INDONESIA IN *UNITED NATIONS AFRICAN MISSION IN DARFUR (UNAMID)* MISSION IN 2015-2020

By

SALSABILLA SASTRA

The Darfur conflict that occurred in 2003 made the African Union and the United Nations form a joint peace mission called *United Nations African Mission in Darfur (UNAMID)*. Indonesia is also involved by deploying its peacekeeping troops from the Indonesian National Police known as *Formed Police Unit Indonesia*. The author examines Indonesia's national interests through the involvement of the Indonesian FPU in the UNAMID mission for the 2015-2020 period. The purposes of this study are to describe the involvement of the Indonesian FPU in the UNAMID mission and describe Indonesia's national interests through the involvement of the Indonesian FPU in the UNAMID mission in 2015-2020 using a descriptive qualitative approach. This study uses the theory of foreign policy and the concept of national interest to analyze primary data through interviews with the Head of the Monitoring & Evaluation Sub-Division of Peace & Humanitarian Section Division of the International Mission Bureau of the Indonesian Police and secondary data derived from literature and documentation studies. The analysis technique used in this study is Miles and Hubberman's qualitative data analysis technique which includes the stages of data condensation, data presentation as well as drawing conclusions and data verification. Based on the results of the research, it can be concluded that Indonesia's national interest through the involvement of the Indonesian FPU in the UNAMID mission in the 2015-2020 period is a form of embodiment of the doctrine adopted by Indonesia, namely the 1945 Constitution Paragraph 4. In addition, this is an effort to achieve the target of becoming one of the 10 countries the largest contributor of troops in the UN mission and strategy for advancing in the election of non-permanent members of the UN Security Council for the 2019-2020 period.

Keywords: Indonesia's National Interests, Indonesia's FPU, UNAMID

**KEPENTINGAN INDONESIA MELALUI KETERLIBATAN *FORMED
POLICE UNIT (FPU) INDONESIA* DALAM MISI *UNITED NATIONS
AFRICAN MISSION IN DARFUR (UNAMID)* PADA 2015-2020**

Oleh

SALSABILLA SASTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN INDONESIA MELALUI
KETERLIBATAN FORMED POLICE UNIT
(FPU) INDONESIA DALAM MISI UNITED
NATIONS AFRICAN MISSION IN DARFUR
(UNAMID) PADA 2015-2020**

Nama Mahasiswa : **Salsabilla Sastra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616071015**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP 19791230 201404 1 001


Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP 19910502 202012 2 020

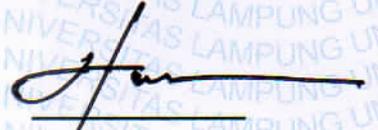
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.
NIP 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

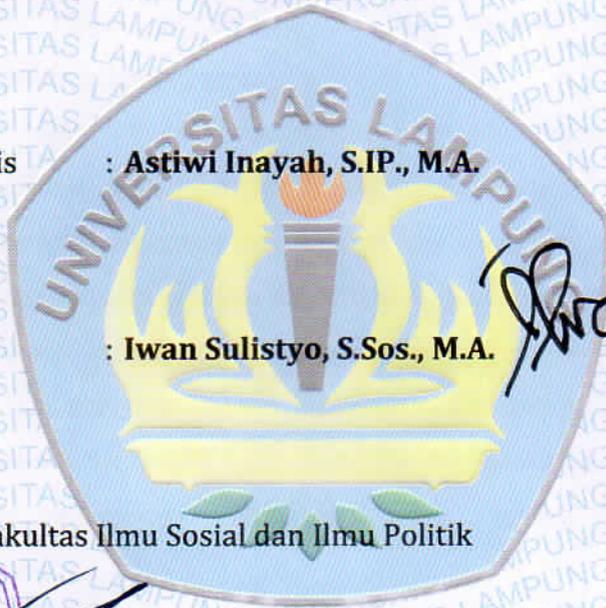
Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.



Penguji : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Salsabilla Sastra

1616071015

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Salsabilla Sastra dilahirkan di Bandarlampung pada 24 Januari 1998 dari pasangan Bapak Afridi Sastra dan Ibu Ermimala Revia sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Bandarlampung pada 2003 kemudian dilanjutkan di SD Kartika II-5 (Persit) Bandarlampung pada 2004-2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP IT Ar-Raihan Bandarlampung dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA IT Ar-Raihan Bandarlampung dan lulus pada tahun 2016.

Setelah menempuh pendidikan di bangku sekolah, penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Lampung pada Jurusan Hubungan Internasional melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan UKM-U PIK M Raya Unila sebagai staf dan juga pada kegiatan eksternal seperti menjadi *volunteer* pada Invitation Tournament Asian Games pada bulan Februari 2018 dan koordinator *volunteer* pada Asian Games pada bulan Agustus 2018.

MOTTO

*Dream as if you will live forever,
And live as if you'll die today.*

[C.h.a.o.s.m.y.t.h. – ONE OK ROCK]

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kasih sayang, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT

yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik

Bapak Afridi Sastra dan Ibu Ermimala Revia

Tulisan ini sebagai wujud rasa terima kasih yang tak terhingga atas semua limpahan doa serta dukungan yang telah diberikan dan selalu memberi semangat kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sepanjang masa.

Achmad Sami Sastra

Tulisan ini sebagai tanda terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan kehidupan sehari-hari.

Saya Sendiri

Tulisan ini merupakan bentuk penghargaan bagi diri saya sendiri yang pantang menyerah mewujudkan mimpi hingga berhasil sampai di salah satu tahapan penting dalam kehidupan, terimakasih untuk terus berjuang di tengah kondisi yang bisa membuatmu menyerah kapanpun.

Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional

Terimakasih atas ilmu, waktu dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis.

Dan untuk Almamaterku tercinta,

Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Kepentingan Indonesia Melalui Keterlibatan Formed Police Unit (FPU) Indonesia dalam misi United Nations African Mission in Darfur (UNAMID) pada 2015-2020*”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan, nasihat, bantuan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani kehidupan serta Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
4. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
5. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan ilmu dan waktu serta selalu memberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi dan pengalaman hidup kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi;

6. Mbak Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan ilmu dan waktu serta tanpa henti memberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi dan pengalaman kepada penulis dalam proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi;
7. Mas Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan ilmu dan meluangkan waktu serta memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat berharga terkait tugas akhir kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu beserta staf jurusan atas bekal ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
9. Bapak Afridi Sastra dan Ibu Ermimala Revia selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa dalam setiap langkahku, nasihat untuk menjalani kehidupan, motivasi serta materi bagi penulis untuk menggapai semua cita-cita dan menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
10. Achmad Sami Sastra selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis;
11. Azelia Azhaar Purwadi, Khoirunnisa Pitaloka, Rafida Ardelia, Reka Mauria, Riska Febriana dan Mas Muhammad Rifqi yang telah menemani hari-hari penulis serta selalu memberikan dukungan kepada penulis sejak di bangku SMA, terimakasih telah menjaga ikatan pertemanan hingga saat ini;
12. Elpya, Risa Dwi Anggraini, Riska, Vini Dwi Ayu Fauziah, Wulan Bella Santika yang selalu menemani dan mendengarkan semua curahan hati penulis selama perjalanan di perkuliahan, terimakasih atas dukungan yang tiada henti kepada penulis hingga saat ini;

13. Titik Kurniasari, Muthia Azzhara, Ulfa Islami Hidayat, Fira Agustin selaku teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang saling memberikan semangat dan motivasi untuk menuntaskan studi;
14. Anggota Super Junior yaitu Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook dan Kyuhyun yang menjadi salah satu sumber penyemangat penulis selama mengerjakan skripsi;
15. Untuk diri saya sendiri yang pada akhirnya mampu sampai di titik ini, terima kasih karena tetap berjuang, bertahan dan percaya kepada diri sendiri demi menggapai mimpi-mimpimu di saat yang lain meragukanmu.

Bandarlampung, 22 Februari 2023

Penulis

Salsabilla Sastra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Konseptual/Teori	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Teknik Analisis Data.....	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Konflik Darfur tahun 2003.....	27
4.2 Terbentuknya misi UNAMID	33
4.3 FPU Indonesia dalam misi UNAMID.....	35
4.4 Analisis Kepentingan Indonesia Melalui Keterlibatan FPU Indonesia pada Misi UNAMID	38
4.3.1 Keterlibatan pada misi UNAMID sebagai bentuk perwujudan doktrin Indonesia	41
4.3.2 Mencapai target menjadi salah satu dari 10 negara pengirim pasukan perdamaian terbesar di dunia	47

4.3.3 Keterlibatan aktif pada misi perdamaian sebagai bagian dari strategi pencalonan Indonesia untuk terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020	53
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4. 1 Jumlah personel FPU I-XII Indonesia dalam Misi UNAMID.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Darfur.....	28
Gambar 4. 2 Pembagian wilayah anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2018.....	59
Gambar 4. 3 14 formasi negara anggota DK PBB selama Indonesia bertugas.....	60

DAFTAR SINGKATAN

DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FPU	:	<i>Formed Police Unit</i>
JEM	:	<i>Justice and Equality Movement</i>
Kemlu	:	Kementrian Luar Negeri
MPP PBB	:	Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
SAF	:	<i>Sudan Armed Force</i>
SLM/A	:	<i>Sudan Liberation Movement/Army</i>
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UNAMID	:	<i>United Nations African Mission in Darfur</i>
UNDPKO	:	<i>United Nation Departemen of Peacekeeping Operation</i>
UNPKO	:	<i>United Nations Peacekeeping Operation</i>
UNTSO	:	<i>United Nations Truce Supervision Organization</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nations Peacekeeping Operation (UN PKO) atau dikenal juga dengan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MPP PBB) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi antarbangsa untuk membantu mengatasi konflik yang sedang terjadi di suatu negara. Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) ini dilakukan sebagai salah satu wujud upaya untuk menciptakan perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 1948 yaitu ketika Dewan Keamanan mengeluarkan izin untuk menempatkan pengamat militer PBB ke Timur Tengah yang kemudian dikenal dengan Misi *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) atau Operasi Pengawas Gencatan Senjata PBB. Dalam menjalankan misi, terdapat tiga prinsip utama yang saling terkait dan saling memperkuat yang sifatnya harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia internasional. Tiga prinsip utama pelaksanaan pemeliharaan perdamaian tersebut menurut *United Nations Peacekeeping* adalah :

1. terdapat persetujuan dari para pihak yang terlibat konflik;
2. ketidakberpihakan;
3. tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat.

Sejak dimulai pada 1948, terdapat lebih dari 70 misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan lebih dari 120 negara-negara yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini (Nations, Our History). Salah satu negara yang ikut terlibat dalam memberikan kontribusi pada pelaksanaan kegiatan ini adalah Indonesia. Indonesia

mulai aktif berkontribusi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sejak tahun 1957. Kontribusi Indonesia dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MPP PBB) dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Alinea ke-IV yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah misi pemeliharaan perdamaian PBB masih menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019. Dalam rencana strategis tersebut, dijelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 8 arah kebijakan serta strategi politik luar negeri Indonesia pada 2015-2019 yang salah satunya adalah peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* di dunia internasional (Indonesia, 2015). Demi mewujudkan hal ini maka salah satu strategi yang diusung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah meningkatkan kontribusi Indonesia untuk mencapai “Visi 4.000 *Peacekeepers*” dan menempati posisi sebagai salah satu dari 10 negara penyumbang pasukan perdamaian terbanyak di dunia.

Untuk mewujudkan target tersebut maka pemerintah kemudian mencanangkan *Vision 4.000 Peacekeepers* melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Luar Negeri No 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel. Melalui visi ini, Indonesia diharapkan mampu masuk ke dalam 10 negara penyumbang pasukan terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Visi ini memuat gambaran umum serta menjabarkan tahapan atau strategi-strategi yang diperlukan demi mencapai target menjadi salah satu dari 10 negara penyumbang pasukan terbesar dan mampu mengirimkan total 4.000 personel perdamaian setiap tahunnya yang ditargetkan akan tercapai pada 2019.

Vision 4.000 peacekeepers merupakan visi yang telah dicanangkan oleh presiden sejak 20 Maret 2012 yang bertujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara terbesar yang menyumbangkan pasukan perdamaannya pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke wilayah misi pemeliharaan perdamaian PBB tentu perlu memperhatikan beberapa hal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian pada Pasal 6 disebutkan bahwa pengiriman pasukan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. kepentingan nasional;
2. pertimbangan politis;
3. prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian;
4. keamanan dan keselamatan personel yang bertugas;
5. ketersediaan dukungan personel, materiil, peralatan dan pendanaan.

Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah terkait juga turut memperhatikan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Pasal 10. Dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian yang berasal dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pada 2018, terdapat delapan wilayah Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MPP PBB) yang menjadi tempat para pasukan perdamaian Indonesia menjalankan tugasnya yaitu MINURSO (Sahara Barat), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MINUSMA (Mali), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), UNAMID (Darfur), UNIFIL (Lebanon), UNISFA (Abyei) dan UNMISS (Sudan Selatan) (Indonesia K. L., 2019).

Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB yang berada di Darfur (Sudan) atau dikenal dengan misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) menjadi salah satu fokus utama Indonesia sebagai salah satu negara yang turut berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan ini. UNAMID merupakan misi perdamaian PBB yang secara resmi dibentuk pada 31 Juli 2007 dengan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa/DK PBB Nomor 1769 Tahun 2007.

Pembentukan UNAMID didasari oleh adanya konflik yang terjadi di Darfur pada Februari 2003. Konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya diskriminasi yang dialami masyarakat dan pembangunan yang tidak merata sehingga masyarakat merasa terpinggirkan. Konflik yang terjadi di Darfur melibatkan dua blok yaitu pemberontak Darfur yang tergabung dalam kelompok JEM (*Justice and Equality Movement*) bersama dengan SLM/A (*Sudan Liberation Movement/Army*) melawan pemerintah Sudan yang memanfaatkan SAF (*Sudan Armed Forces*) dan milisi Janjaweed (Danielova, 2014). Pertarungan melawan pemberontak kemudian berubah menjadi awal pembantaian warga sipil. Para aktor yang terlibat dalam konflik ini melakukan beragam taktik penyerangan baik menggunakan persenjataan maupun non-senjata seperti yang dilakukan oleh milisi Janjaweed yang menggunakan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai salah satu taktik yang digunakan pada konflik ini.

Selain melakukan pemerkosaan, milisi juga menghancurkan dan membakar segala sesuatu yang bermanfaat bagi penduduk Darfur. Akibat terjadinya konflik yang terus-menerus dan dampaknya yang merugikan bagi warga sipil, PBB kemudian bekerja sama dengan Uni Afrika sebagai organisasi regional di Afrika membentuk sebuah misi gabungan yang dinamakan UNAMID. UNAMID dibentuk dengan tujuan menciptakan dan memelihara perdamaian di Darfur. UNAMID merupakan misi yang menggantikan AMIS (*The African Union Mission in Sudan*) yang dibentuk oleh Uni Afrika. Dewan Keamanan PBB kemudian memberikan mandat kepada *United Nations Departement of Peacekeeping Operations* (UNDPKO) untuk melaksanakan operasi gabungan atau *hybrid operation* dengan Uni Afrika (*African Mission In The Sudan/AMIS*) yang kemudian dikenal dengan *United Nations Mission in Darfur* (UNAMID) yang secara resmi dilaksanakan pada 1 Januari 2008 (Indonesia, 2008).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB turut berpartisipasi dalam misi UNAMID. Pasukan perdamaian yang ikut serta berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dalam misi ini berasal dari personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dikenal dengan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit/FPU*) atau disebut FPU Indonesia. FPU Indonesia secara resmi terbentuk

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit/FPU*) Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur, Sudan. Setelah secara resmi dibentuk pada 2008, Polri setiap tahunnya selalu mengirimkan pasukan FPU Indonesia ke Darfur untuk ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam rentang waktu periode 2015 hingga periode 2020, Polri telah mengirimkan pasukan FPU Indonesia sebanyak 851 personel.

Dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur, para pasukan FPU Indonesia yang sedang bertugas menunjukkan kepeduliannya terhadap warga sekitar dengan memberikan sejumlah bantuan. Pada 2020, sebagai bentuk kepedulian serta untuk membantu meringankan beban terhadap warga yang terdampak konflik, FPU Indonesia XI yang sedang bertugas di Darfur berinisiatif untuk memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan ibadah dan juga perlengkapan sekolah dengan nilai US \$ 6.000 (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, 2020). Pemberian bantuan terhadap masyarakat sekitar merupakan contoh upaya pasukan perdamaian Indonesia untuk terlibat aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian di dunia.

Pemberian bantuan ini juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian dan rasa solidaritas Indonesia terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak konflik melalui pasukan perdamaianya. Selain memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah dan ibadah, pada 2017, pasukan perdamaian Indonesia juga pernah memberikan bantuan berupa pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bantuan ini diberikan oleh tim medis FPU Indonesia IX kepada masyarakat yang tinggal di kamp pengungsi yang berada di Zam-Zam IDPs *camp*. Selain memberikan bantuan berupa pelayanan kesehatan gratis, tim medis FPU Indonesia IX juga memberikan masker dan *handsanitizer* serta mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar.

Pada Februari 2020, pasukan FPU Indonesia XI yang bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur kembali membuat bangga Indonesia dengan diraihnya Medali PBB atau *UN Medal*. *UN Medal* atau medali PBB merupakan sebuah medali perunggu yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB

pada 1966 (Peacekeeping). Medali ini diberikan kepada personel militer atau polisi sipil yang sedang atau pernah bertugas dalam misi perdamaian PBB. Upacara Penganugerahan Tanda Jasa UNAMID atau *The Unamid Medal Parade* dilaksanakan di *Camp Golo*, Jebel Mara, Darfur Tengah. Penghargaan ini diberikan kepada pasukan FPU Indonesia XI atas jasa yang telah diberikan dan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi yang dilakukan oleh pasukan FPU Indonesia dalam melaksanakan misi perdamaian PBB di Darfur. Medali PBB tersebut diberikan kepada 139 pasukan FPU XI yang bertugas di Darfur.

Pemberian medali PBB terhadap pasukan FPU XI ini didasari atas kontribusi aktif para pasukan perdamaian terhadap kegiatan sosial seperti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar di Rumah Sakit Golo, menjaga kebersihan lingkungan serta semangat kerja yang tinggi dalam meredam konflik berbasis gender dan juga memberikan rasa aman terhadap wanita dan anak-anak yang terdampak konflik. Hal ini kemudian menjadi bahan pertimbangan utama bagi Sekretaris Jenderal PBB serta Pimpinan UNAMID untuk memberikan penghargaan tertinggi berupa medali PBB atau *UN Medal* bagi pasukan FPU Indonesia. (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, 2020). Pada 2011 Indonesia juga pernah meraih *UN Medal* yang saat itu dianugerahkan kepada pasukan FPU Indonesia III. Penghargaan ini diberikan atas kinerja serta komitmen yang sangat baik yang dijalankan oleh FPU Indonesia selama bertugas di Darfur. Kemudian di tahun 2018 PBB kembali memberikan Medali PBB kepada FPU Indonesia X yang sedang menjalankan misi di Darfur yang berjumlah 140 personel sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja para pasukan perdamaian Indonesia yang dinilai baik dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur.

Kontribusi Indonesia dalam turut serta bergabung pada misi pemeliharaan perdamaian di luar wilayah Indonesia merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri Indonesia. Pengiriman pasukan perdamaian ini dilaksanakan dengan turut memperhatikan kepentingan Indonesia di dalamnya. Adanya komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban di dunia melalui pengiriman pasukan perdamaian ke salah satu misi pemeliharaan perdamaian yang berada di Darfur (UNAMID), maka peneliti

memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai kepentingan Indonesia melalui keterlibatan *Formed Police Unit* Indonesia dalam misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) pada 2015-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik yang terjadi di Darfur pada 2003 menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian PBB dikarenakan dampaknya terhadap masyarakat sipil dan konflik yang terjadi semakin meluas sehingga PBB dengan Uni Afrika kemudian memutuskan untuk membentuk UNAMID. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB ikut berpartisipasi pada misi ini. Keterlibatan Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri Indonesia yang menjadi indikator penting dalam menunjukkan kontribusi Indonesia guna mewujudkan perdamaian di dunia internasional.

Komitmen kuat untuk turut serta menjaga perdamaian di dunia dibuktikan dengan pengiriman Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit/FPU*) Indonesia dalam misi UNAMID. Melalui pengiriman pasukan FPU Indonesia, diharapkan para pasukan perdamaian yang bertugas dapat mendukung tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Melalui penjelasan di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu : **“Apa kepentingan Indonesia melalui keterlibatan *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia dalam misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) pada 2015-2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dipenuhi berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah :

- a) Mendeskripsikan keterlibatan *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia dalam misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) tahun 2015-2020;
- b) Mendeskripsikan kepentingan nasional Indonesia melalui keterlibatan *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia dalam misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a) Secara akademis: diharapkan mampu meningkatkan dan memperluas pemahaman mengenai keterlibatan pasukan perdamaian dan kepentingan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB khususnya pada misi UNAMID.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi serta landasan maupun informasi yang sangat berguna dalam suatu penelitian. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan serta teori maupun konsep yang sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan sehingga dapat membantu peneliti membangun kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Rani Eka Syahputri (2018) dengan menggunakan teori maupun konsep kebijakan luar negeri, konstruktivisme serta identitas untuk membantu penelitiannya. Rani menemukan bahwa Indonesia yang berkomitmen untuk ikut serta berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB didorong oleh identitas personal Indonesia sebagai “*a million friends zero enemy*” yang bermakna bahwa Indonesia berteman dengan semua pihak dan dapat membangun konektivitas. Selain didorong oleh identitas personal, keterlibatan Indonesia juga didorong dengan adanya identitas kolektif sebagai salah satu negara anggota PBB yaitu tetap konsisten memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan internasional dengan cara damai.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Leonard F. Hutabarat (2014) yang merupakan mantan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dan meneliti mengenai partisipasi pasukan perdamaian Indonesia sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Leonard menggunakan pemahaman realis serta teori kebijakan luar negeri dalam penelitian ini. Menurut Leonard, pemerintah Indonesia ikut berpartisipasi dalam *UN peacekeeping operations* bertujuan sebagai strategi dalam berintegrasi ke sistem internasional. Partisipasi

dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat menjadi instrumen membantu tercapainya kepentingan nasional. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaianya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB juga bertujuan untuk memenuhi komitmennya untuk turut menjaga pemeliharaan perdamaian di dunia. Selain itu Indonesia juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB untuk bergabung menjadi 10 negara terbesar penyumbang pasukan perdamaian PBB. Menurut Leonard, berpartisipasi secara efektif pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dapat meningkatkan *bargaining power* Indonesia yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan *soft power* dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan sumber daya terhadap sektor pertahanan.

Penelitian terdahulu ketiga merupakan penelitian oleh Katsumi Ishizuka (2002). Penelitian ini meneliti mengenai motivasi serta kepentingan nasional negara-negara yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dalam penelitian ini, Katsumi menjelaskan bahwa negara-negara yang berkontribusi untuk mempertahankan perdamaian serta keamanan internasional dengan berpartisipasi pada misi pemeliharaan PBB secara sukarela dan bersungguh-sungguh dikarenakan adanya ketertarikan terhadap keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional ini meliputi sifat internasionalisme atau ambisi internasional serta nasionalisme atau kepentingan dalam negeri sehingga setiap negara dengan kekuasaan politik yang besar, menengah dan kecil yang berpartisipasi tentu memiliki pertimbangan untuk terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian baik pertimbangan secara internasional atau secara domestik. Pertimbangan internasional terdiri atas faktor-faktor kebijakan luar negeri secara umum dan khusus sedangkan pertimbangan domestik berasal dari politik, faktor keuangan dan militer suatu negara.

Pada penelitian ini, Katsumi memberikan contoh yaitu peran Malaysia sebagai kekuatan politik yang kecil pada partisipasinya dalam menjaga perdamaian. Bagi negara-negara kecil yang berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian untuk menjaga keamanan internasional, terlibat dalam operasi perdamaian merupakan kontribusi yang ideal dikarenakan tidak memerlukan peralatan militer yang canggih dan berat. Selain itu, sebegini besar motivasi mereka untuk ikut

terlibat aktif adalah keinginan untuk meningkatkan status relatif dalam PBB khususnya Majelis Umum terhadap dominasi dari negara dengan kekuatan politik yang lebih besar. Selain itu, fakta bahwa sebagian besar wilayah misi pemeliharaan perdamaian yang berada di wilayah Dunia Ketiga telah memotivasi mereka untuk mengirimkan pasukan sebagai bentuk dari rasa simpati.

Malaysia menjadi salah satu penyumbang pasukan perdamaian PBB dari negara-negara kecil yang telah mendapatkan pengakuan dari *UN Peacekeeping*. Malaysia memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin politik regional di Asia Tenggara diakui dengan perannya di ASEAN dan komitmen semangatnya terhadap *The East Asia Economic Caucus*. Malaysia memiliki komitmen yang konsisten dan gigih dalam operasi penjaga perdamaian yang terlihat dalam keikutsertaannya pada hampir semua operasi perdamaian sekala besar seperti ONUC (Kongo), UNTAG (Namibia), UNTAC (Kamboja), Somalia (UNOSOM II) serta bekas Yugoslavia (UNPROFOR) dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Selain itu komitmen ini juga dibuktikan dengan meningkatkan kekuatan pasukannya di Somalia pada saat negara-negara barat justru menarik diri secara serentak. Oleh sebab itu, ia kemudian menyerukan adanya reformasi luas dalam PBB seperti komposisi, keanggotaan tetap dan sistem veto pada Dewan Keamanan. Operasi perdamaian kemudian menjadi jalan untuk memunculkan suara Malaysia sebagai negara kecil ke tingkat dunia.

Penelitian terdahulu keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Ranada Hamalia Mustari (2018) yang meneliti mengenai kontribusi pasukan perdamaian yang berasal dari Kepolisian Indonesia dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB atau *United Nation Departemen of Peacekeeping Operation (UNDPKO)* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur yang bertujuan untuk menjaga keamanan manusia atau *human security*. Indonesia pertama kali mengirim pasukan FPU ke misi UNAMID pada 2008 dengan personel yang berjumlah 140 personel yang disebut dengan istilah Garuda Bhayangkara. Menurut Ranada, FPU Indonesia memiliki kontribusi besar untuk membawa nama baik Indonesia dan sebagai contoh bagi FPU dan komponen militer lain pada misi UNAMID.

Selain menjalankan mandat, bentuk kontribusi yang dilakukan oleh personel FPU Indoensia adalah selalu melakukan kegiatan kemanusiaan serta memberi bantuan berupa uang maupun barang kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kegiatan kemanusiaan lainnya yang dilakukan oleh FPU Indonesia contohnya adalah setiap Jumat *camp* Indonesia terbuka untuk dijadikan masjid bagi masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan kemanusiaan serta membangun kepercayaan dan rasa aman agar FPU Indonesia bisa lebih dekat dengan masyarakat Darfur. Dengan membangun kepercayaan terhadap masyarakat sekitar, menjalankan mandat akan berjalan lancar. FPU Indonesia melaksanakan tugas dengan baik sehingga menjadi salah satu FPU terbaik dan hal ini dapat membangun citra yang baik bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia juga konsisten dengan komitmen untuk terus mengirimkan satuan tugas FPU ke Darfur setiap tahun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan.

Penelitian terdahulu kelima ditulis oleh Linda Rosalia (2020) yang meneliti mengenai kepentingan Indonesia melalui keterlibatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia dalam misi UNIFIL di Lebanon. Linda menggunakan konsep dan teori kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri pada penelitiannya. Menurut Linda, partisipasi para pasukan perdamaian perempuan Indonesia dalam misi pemeliharaan PBB di Lebanon atau dikenal dengan UNIFIL merupakan salah satu strategi yang digunakan pemerintah Indoensia untuk masuk ke dalam sistem internasional. Selain bertujuan untuk masuk ke dalam sistem internasional, partisipasi Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan eksistensi negara untuk memperkuat status kepemimpinan, membangun peluang sebagai upaya untuk masuk ke komunitas internasional serta membangun peluang kerjasama secara regional maupun internasional.

Menurut Linda terdapat tiga kepentingan nasional Indonesia yang ingin diwujudkan melalui keterlibatan *women peacekeeper* dalam misi UNIFIL di Lebanon yaitu:

1. *Indonesian Women Peacekeepers* menjadi *role model* bagi *women peacekeepers* negara lain dan masyarakat Lebanon;

2. *Indonesian Women Peacekeepers* sebagai bagian strategi Indonesia dalam pencalonan anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB dan Ketua Bersama ADMM Plus EWG on PKO;
3. *Indonesian Women Peacekeepers* sebagai instrumen diplomasi *Middle Power* Indonesia pada misi UNIFIL.

Sebagai salah satu negara yang ikut berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon serta sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan PKO yang mengutamakan kesetaraan gender, Indonesia terus berupaya mengirmikan personel terbaik yang berasal dari pasukan militer maupun kepolisian baik laki-laki atau perempuan. Menurut Linda, kehadiran pasukan perdamaian perempuan dalam sebuah misi pemeliharaan perdamaian diharapkan membantu program *peacekeeping operation* pada pendekatan sosiokultural, pelayanan kemanusiaan & medis, pendekatan religius dan penanganan hal tertentu terkait sensitifitas gender.

Dengan adanya partisipasi pasukan perdamaian perempuan Indonesia dalam misi UNIFIL, diharapkan dapat membantu mengurangi konflik yang terjadi, meningkatkan akses maupun dukungan bagi perempuan lokal, memberikan teladan bagi masyarakat khususnya perempuan, memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak-anak yang terkena dampak konflik serta memperluas keterampilan dalam misi yang sedang dijalankan. Atas dasar komitmen tersebut, maka diharapkan Indonesia dapat menjadi *role model* dalam hal kesetaraan gender baik dalam tubuh PKO maupun bagi masyarakat Lebanon.

Peran Indoensian Woman Peacekeper dalam misi UNIFIL memiliki tujuan untuk memberikan dampak positif untuk memperkuat peran Indonesia di PBB dengan menciptakan peluang yang lebih besar agar Indonesia dapat menduduki jabatan yang startegis dalam pelaksanaan misi maupun dalam markas besar PBB. Indonesia memasukan misi UNIFIL sebagai salah satu misi prioritas dalam kebijakan luar negerinya dengan agenda penting untuk mencapai keanggotaan tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB. Selain dalam lingkup internasional, PKO juga menjadi isu prioritas nasional negara-negara anggota ASEAN. Atas dasar ini maka Indonesia juga memiliki tujuan untuk dapat menduduki jabatan

strategis yaitu menjadi ketua bersama ADMM *Plus* EWG PKO pada periode 2017-2020. Demi mencapai kepentingan ini, maka Indonesia menerapkan beberapa strategi yang salah satunya adalah berperan aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu keamanan internasional. Hal ini dilakukan dengan ikut berpartisipasi mengirimkan pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian yang salah satunya adalah misi UNIFIL.

Linda mengungkapkan dalam penelitiannya, salah satu upaya Indonesia untuk meningkatkan eksistensinya dalam tatanan dunia adalah berupaya meningkatkan peran global Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi *middle power* untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global. Perilaku *middle power* Indonesia tercermin dalam tindakannya pada forum-forum multilateral serta berusaha menjadi jembatan bagi *great power* dan *small power*. Hal ini diwujudkan dalam konflik Lebanon dengan mengirimkan pasukan *Indonesian Women Peacekeeper* sebagai salah satu alat diplomasi *middle power* serta sebagai mediator untuk pemulihan konflik yang terjadi di Lebanon dan sebagai jembatan bagi *great power* dalam hal ini adalah PBB dengan *small power* yaitu Lebanon.

Beberapa penelitian terdahulu sangat membantu peneliti dengan adanya berbagai konsep dan teori yang memiliki kesamaan untuk lebih memahami kepentingan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Penelitian terdahulu juga membantu peneliti membangun kerangka berpikir bahwa kepentingan nasional Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan PBB. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya spesifikasi pada keterlibatan pasukan perdamaian yang berasal dari Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit/FPU*) atau FPU Indonesia dan pemilihan misi pemeliharaan PBB di Darfur yaitu *United Nations African Mission in Darfur (UNAMID)* untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Tabel 2. 1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5
Judul	Identitas dan Kepentingan Indonesia Berpartisipasi dalam UN <i>Peacekeeping Operations</i> pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	<i>Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities</i>	<i>Peacekeeping and National Interests: Positive Factors Influencing Potential Contributing States</i>	<i>The Contribution of Indonesian National Police and United Nations Departement of Peacekeeping Operations (UNDPKO) in Maintaining Human Security over the Conflict In Darfur, Sudan (2014-2015)</i>	Kepentingan Indonesia melalui <i>Indonesian Woman Peacekeepers</i> pada Misi <i>United Nations Interim Force in Lebanon</i> pada tahun 2015-2019
Penulis	Rani Eka Syahputri	Leonard F. Hutabarat	Katsumi Ishizuka	Ranada Hamalia Mustari	Linda Rosalia
Teori/konsep	Kebijakan Luar Negeri, Konstruktivisme & Identitas	Kebijakan Luar Negeri & Realis	Kepentingan nasional	Organisasi Internasional, <i>Peacekeeping & Human security</i>	Kepentingan nasional & Kebijakan Luar Negeri
Pendekatan	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif
Fokus penelitian	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya komitmen partisipasi Indonesia dalam <i>UN peacekeeping operations</i> pada era Presiden Susilo	Penelitian ini meneliti keterlibatan <i>pecekeepers</i> sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan Indonesia	Penelitian ini meneliti mengenai motivasi serta kepentingan negara-negara yang terlibat dalam pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian PBB	Penelitian ini meneliti mengenai kontribusi pasukan perdamaian Indonesia yang berasal dari kepolisian Indonesia dan Departemen Operasi Perdamaian PBB dalam menjaga keamanan	Penelitian ini meneliti mengenai keterlibatan <i>Indonesian Woman Peacekeepers</i> dalam misi PBB di UNIFIL Lebanon sebagai upaya untuk mencapai kepentingan Indonesia

	Bambang Yudhoyono dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi tindakan itu.			manusia dalam konflik di Darfur, Sudan.	
Hasil penelitian	Indonesia ikut berpartisipasi dalam <i>UN Peacekeeping Operations</i> didorong oleh adanya identitas personal yaitu “ <i>a million friends zero enemy</i> ” serta adanya identitas kolektif sebagai salah satu negara anggota PBB.	Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sehingga dapat masuk kedalam 10 negara terbesar penyumbang pasukan perdamaian. Berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat meningkatkan <i>bargaining power</i> Indonesia yang dapat meningkatkan <i>soft power</i> dan sumber daya dalam bidang pertahanan.	Negara-negara dengan kekuatan politik yang besar, menengah dan kecil yang berkontribusi untuk mempertahankan perdamaian serta keamanan internasional dengan berpartisipasi pada misi pemeliharaan PBB dikarenakan adanya ketertarikan terhadap keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kepentingan. Setiap negara yang terlibat juga tentu memiliki pertimbangan baik pertimbangan secara internasional atau secara domestik. Pertimbangan internasional terdiri atas faktor-faktor kebijakan luar negeri secara umum dan	Keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia yang berasal dari kepolisian Indonesia yang dikenal dengan FPU Indonesia memiliki kontribusi besar untuk membawa nama baik Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini, selain menjalankan mandat, kontribusi Indonesia dilakukan dengan melakukan kegiatan kemanusiaan seperti memberi bantuan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan rasa aman masyarakat sekitar.	Keterlibatan pasukan perdamaian perempuan Indonesia pada misi UNIFIL merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia. melalui keterlibatan pasukan <i>Indonesian Woman Peacekeepers</i> terdapat tiga kepentingan Indonesia yang ingin diwujudkan yaitu <i>Indonesian women peacekeepers</i> menjadi <i>role model</i> bagi <i>women peacekeepers</i> negara lain dan masyarakat Lebanon, <i>Indonesian Women Peacekeepers</i> sebagai bagian strategi

			khusus sedangkan pertimbangan domestic berasal dari politik, factor keuangan dan militer suatu negara		Indonesia dalam pencalonan anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB dan Ketua Bersama ADMM <i>Plus</i> EWG on PKO Dan <i>Indonesian</i> <i>Women</i> <i>Peacekeeper</i> <i>s</i> sebagai instrumen diplomasi <i>Middle</i> <i>Power</i> Indonesia pada misi UNIFIL
--	--	--	---	--	---

Sumber : diolah oleh peneliti

2.2 Landasan Konseptual/Teori

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai “Apa kepentingan Indonesia melalui keterlibatan *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia pada misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) pada 2015-2020?” maka teori kebijakan luar negeri dibantu dengan konsep kepentingan nasional relevan digunakan dalam penelitian ini. Teori kebijakan luar negeri beserta konsep kepentingan nasional digunakan sebagai landasan utama untuk menjelaskan keterlibatan satuan tugas FPU Indonesia dalam misi UNAMID sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

2.2.1 Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional atau *national interest* adalah salah satu konsep yang terdapat dalam hubungan internasional. Terdapat beragam pendapat mengenai kepentingan nasional yang ditulis oleh para ahli. Salah satunya adalah Alexander Wendt dalam pandangan konstruktivis. Menurut Alexander Wendt, konstruktivis merupakan teori struktural dalam sistem internasional yang memiliki pandangan bahawa negara merupakan unit utama untuk menganalisis teori politik internasional, struktur utama dalam sistem negara bersifat intersubyektif yang bukan material dan identitas serta kepentingan negara merupakan suatu hal yang dibangun oleh struktur sosial dan bukan merupakan sesuatu hal yang “*given*” (Burchill, 2005).

Dalam pandangan konstruktivis, kepentingan nasional merupakan kepentingan yang dibangun oleh kelompok yang dominan dalam masyarakat untuk mengamankan identitas tertentu dan dapat dilihat sebagai indikator utama dalam melihat perilaku suatu negara. Menurut pandangan konstruktivis, kepentingan merupakan sesuatu yang tidak tetap melainkan berubah-ubah yang dikembangkan dan dipelajari dari waktu ke waktu didasarkan pada pengalaman (Burchill, 2005). Hal ini dikarenakan sebgai besar kepentingan ditentukan melalui interaksi sosial yang bervariasi dari waktu ke waktu.

Menurut pandangan Wendt, identitas (*identity*) dan kepentingan (*interest*) merupakan dasar dari kepentingan. Identitas mengacu pada siapa atau apa aktor yang berperan dan kepentingan mengacu pada apa yang diinginkan oleh aktor tersebut dan kedua hal ini kemudian saling terkait serta dibentuk secara sosial (Burchill, 2005). Alexander Wendt berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan objektif negara-masyarakat yang kompleks yang terdiri atas empat kebutuhan yaitu *physical survival, autonomy, economic well-being dan collective self esteem* (Wendt, 1999). Wendt kemudian menjelaskan empat jenis kepentingan tersebut yaitu :

1. *Physical survival*

Physical survival mengacu pada analisis terakhir individu yang membentuk masyarakat negara yang kompleks. Waltz berasumsi bahwa kelangsungan hidup atau *physical survival* merupakan satu-satunya kepentingan nasional negara.

2. *Autonomy*

Autonomy mengacu pada kemampuan negara untuk mengontrol alokasi atas sumber daya dan pilihan pemerintah.

3. *Economic well being*

Economic well being mengacu pada pemeliharaan cara produksi dan perluasan dalam masyarakat yang didasarkan pada sumber daya negara.

4. *Collective self esteem*

Collective self esteem merupakan kebutuhan dasar individu atau kelompok untuk merasa nyaman dengan diri sendiri dan berkaitan dengan suatu kehormatan atau status. Harga diri juga merupakan suatu hal yang dicari oleh individu dalam keanggotanya di dalam suatu kelompok. Hal ini juga merupakan ungkapan untuk memperoleh kebutuhan dalam suatu kelompok. *Collective self esteem* kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Wendt yaitu citra positif dan citra negatif yang bergantung pada perspektif orang lain. Citra negatif muncul dari adanya pengabaian atau penghinaan yang dirasakan dari negara lain sedangkan citra positif muncul dari rasa saling menghormati dan adanya kerjasama.

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan konsep kepentingan nasional digunakan sebagai landasan utama untuk mengetahui kepentingan nasional Indonesia berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur.

2.2.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur mengenai kewenangan tindakan dari negara berdaulat yang pelaksanaannya ditempatkan pada lingkungan internasional (Paquin, 2018). Beberapa ahli berpendapat bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya sebagai tindakan melainkan juga sebagai visi yang dimiliki suatu negara yang berhubungan dengan kedudukannya di dunia, kepentingan nasional dan prinsip utama untuk mempertahankan negaranya. Kebijakan luar negeri juga digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan kepentingannya vital suatu negara yang ditujukan untuk menjamin keamanan maupun memaksimalkan kekuasaan negara (Paquin, 2018).

Para ahli berpendapat bahwa kebijakan luar negeri memiliki sasaran untuk keseimbangan sistem internasional, menghimpun kekayaan, meningkatkan kekuasaan, mempertahankan pemimpin yang berkuasa atau menghasilkan identitas nasional (Paquin, 2018). Kebijakan luar negeri dapat diidentifikasi melalui beragam hal seperti *goal communicated*, *doctrine* dan *national interest* (Paquin, 2018). Deklarasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara seperti pernyataan kebijakan, pidato para pejabat yang berwenang dan dokumen resmi dapat digunakan sebagai informasi untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara yang dikenal dengan istilah *goal communicated*.

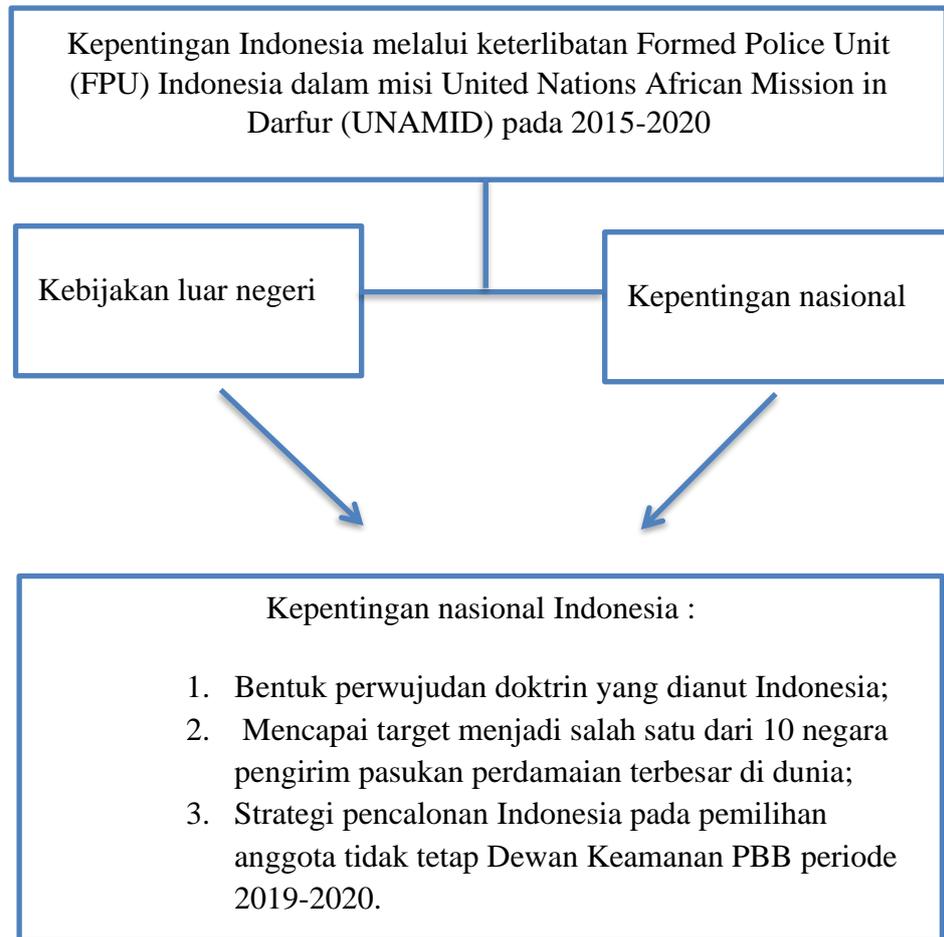
Selain *goal communicated*, identifikasi kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat dari doktrin yang dianut oleh negara tersebut. Doktrin digunakan sebagai aturan, panduan, prinsip atau keyakinan yang dijadikan panduan kebijakan luar negeri. Doktrin seperti sebuah gambaran yang digunakan untuk memahami kepentingan, keyakinan dan prinsip suatu negara yang dapat dijadikan untuk memprediksi perilaku negara ke depannya. Selain *goal communicated* dan doktrin, kepentingan nasional juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan luar negeri suatu negara.

Menurut David Callahan kepentingan nasional memiliki kerangka kerja yang terdiri atas “kebutuhan” dan “keinginan” (Paquin, 2018). Menurut David, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu hal vital yang menjamin perlindungan dan kelangsungan hidup seperti perlindungan terhadap warga negara, akses ke sumber daya energi, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Keinginan mengacu pada keinginan negara yang tidak memiliki dampak langsung pada keamanan vital seperti dukungan terhadap HAM, demokrasi di luar negeri serta pencegahan konflik dan kejahatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan permasalahan penelitian yaitu untuk mengeksplorasi kepentingan Indonesia melalui keterlibatan *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia pada misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) pada 2015-2020. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai apa kepentingan Indonesia melalui keterlibatan FPU Indonesia di misi UNAMID 2015-2020, maka peneliti akan menjelaskan bentuk keterlibatan atau partisipasi pasukan perdamaian Indonesia yang khususnya berasal dari personel kepolisian Republik Indonesia yang dikenal dengan satuan tugas FPU Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional atau *national interest* dan kebijakan luar negeri untuk dapat mengetahui kepentingan Indonesia melalui keterlibatan FPU Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di Darfur.

Gambar 2. 1 kerangka pemikiran



(Sumber: diolah oleh peneliti)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut John Creswell penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sarana untuk menjelajahi dan memahami makna yang diberikan oleh suatu individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau individu dan dalam proses penelitian ini melibatkan prosedur serta pertanyaan-pertanyaan yang sesuai (Creswell, 2014). Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif yaitu membangun tema dari tema khusus ke tema umum dan kemudian peneliti membuat interpretasi dari data yang telah didapatkan.

Paul S Gray menjelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih mengandalkan pada kata-kata terutama kata benda dan sifat untuk menyampaikan sesuatu dan keuntungan yang didapat dalam menggunakan metode ini ialah dapat menangkap dan mengartikan makna yang tidak dapat disampaikan melalui angka-angka (Gray & et al., 2007). Penelitian kualitatif memiliki beragam cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Menurut John Creswell, terdapat empat cara yang dapat digunakan yaitu *qualitative observations*, *qualitative interviews*, *qualitative document* dan *qualitative audio and visual materials* (Creswell, 2014).

Qualitative observations merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi tentang perilaku atau aktivitas individu di lapangan dengan cara semi terstruktur atau tidak terstruktur dengan menggunakan beberapa pertanyaan. *Qualitative interview* dilakukan dengan melakukan wawancara secara tatap muka antara peneliti dengan peserta dengan wawancara tidak terstruktur dan umumnya menggunakan pertanyaan terbuka yang jumlahnya sedikit dengan tujuan memperoleh pandangan dan pendapat dari peserta. Dalam *qualitative document*,

data yang didapatkan berasal dari dokumen publik seperti koran, laporan resmi, hasil rapat, jurnal, surat dan lain lain. Data yang didapat dalam *qualitative audio and visual materials* berasal dari foto, benda seni, kaset atau bentuk suara apapun.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *qualitative document* dan *qualitative interview* untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data yang didapatkan berupa laporan atau dokumen resmi seperti Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Tugas oleh Satgas FPU Indonesia tahun 2018-2019, Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Tugas oleh Satgas FPU Indonesia tahun 2019-2020, Buku Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta dokumen yang berasal dari laman resmi yang sesuai dengan penelitian dan wawancara dengan Kasubbagmonev Bagdamkeman Romisinter Divhubinter Polri.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kepentingan Indonesia melalui keterlibatan *Formed Police Unit* pada misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) pada periode 2015-2020 yang diteliti menggunakan konsep kepentingan nasional. Pada penelitian ini, peneliti memilih periode 2015-2020 dikarenakan dalam kurun waktu tersebut pemerintah Indonesia fokus dalam program pengiriman pasukan perdamaian dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan salah satu buktinya ialah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019.

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara atau disebut dengan data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang didapatkan secara tidak langsung yang telah diolah oleh sumber lain kemudian dikumpulkan oleh peneliti melalui studi kepustakaan yang berasal dari jurnal, artikel, situs web dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian atau disebut dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini, data primer yang digunakan didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Monitoring & Evaluasi Bagian Perdamaian & Kemanusiaan Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui Buku Vademikum Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Tugas oleh Satgas FPU Indonesia tahun 2018-2019 dan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Tugas oleh Satgas FPU Indonesia tahun 2019-2020 yang dikeluarkan oleh Divisi Hubungan Internasional Polri, dokumen yang berasal dari penelusuran internet yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian dan laman resmi seperti <https://peacekeeping.un.org/>, <https://unamid.unmissions.org/>, <https://kemlu.go.id> dan lain-lain.

Adapun kendala pada penelitian ini adalah tidak semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh dikarenakan adanya kendala dalam pengumpulan data seperti tidak tersedianya Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Tugas oleh Satgas FPU Indonesia pada periode 2015-2017 serta kendala wawancara yang dilakukan secara non tatap muka dikarenakan narasumber sedang menghadiri suatu kegiatan kerja.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti, maka diperlukan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang telah didapatkan dengan menggunakan proses analisis data yang berasal dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (2014) terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data yaitu :

a. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan atau mengubah data yang telah didapatkan melalui catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan lainnya sehingga data yang didapatkan akan menjadi kuat. Dalam penelitian ini kondensasi dilakukan dengan memilih beberapa data yang relevan dengan penelitian seperti hasil wawancara dengan Kasubbagmonev Bagdamkeman Romisinter Divhubinter Polri, buku Vademikum Divhubinter Polri, Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas FPU Indonesia tahun 2018-2019, dan lain lain.

b. Penyajian data

Penyajian data secara umum berisi kumpulan informasi yang terorganisir dan ringkas yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan tindakan. Penyajian data dapat membantu penulis untuk lebih memahami dan membantu menganalisis tindakan yang dapat diambil lebih lanjut. Dalam penelitian ini penyajian data yang disajikan seperti jumlah pasukan FPU Indonesia I-XII, mandat misi UNAMID, peta wilayah Darfur, jumlah anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, dan lain lain.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian. Pada penarikan kesimpulan peneliti akan mengungkapkan hasil temuan penelitiannya

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada BAB IV maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan FPU Indonesia pada misi UNAMID periode 2015-2020 dapat dilihat sebagai salah satu upaya atau strategi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Indonesia melalui keterlibatan FPU tidak hanya berfokus untuk menjaga perdamaian tetapi juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan keadaan zaman. Salah satu kepentingan nasional yang ingin diwujudkan melalui pengiriman pasukan perdamaian adalah sebagai bentuk perwujudan doktrin yang dianut Indonesia yaitu mewujudkan dan ikut memelihara perdamaian di dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kepentingan nasional lain yang berusaha diwujudkan Pemerintah Indonesia adalah dapat mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian dan masuk ke dalam peringkat sebagai salah satu dari sepuluh negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar di dunia. Untuk mewujudkan kepentingan ini maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019 dengan beragam langkah yang telah disusun. Atas keseriusan Pemerintah Indonesia maka di tahun 2018 Indonesia mampu meraih posisi ke-8 sebagai negara pengirim pasukan perdamaian terbesar di dunia namun Pemerintah Indonesia belum dapat mewujudkan target untuk mengirimkan sebanyak total 4.000 pasukan perdamaian ke beragam misi pemeliharaan perdamaian setiap tahunnya.

Kemudian Kepentingan nasional lain yang ingin diwujudkan adalah terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 yang kemudian berhasil diwujudkan serta memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia dan meningkatkan jenis kepentingan *collective self esteem* yang akan memunculkan citra positif bagi Indonesia di lingkungan internasional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab IV dan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan maka sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang berjudul “Keterlibatan Formed Police Unit (FPU) Indonesia pada misi *United Nations African Mission in Darfur* (UNAMID) periode 2015-2020” peneliti mengajukan beberapa saran yaitu :

- a. Kepada Pemerintah Indonesia untuk terus berkomitmen meningkatkan kontribusinya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan mengirimkan lebih banyak pasukan perdamaian agar target untuk mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian ke beragam misi pemeliharaan perdamaian dapat segera terwujud dan mampu meraih posisi yang lebih tinggi sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar serta berusaha untuk tetap mempertahankan posisi Indonesia dalam 10 negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar di dunia;
- b. Kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas personel yang terlibat dalam pasukan perdamaian serta dapat terlibat lebih banyak dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB lain tidak hanya terbatas pada misi UNAMID.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. H. (2006). Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur. *Jurnal Universitas Pasundan*, 1-9.
- Amelia, M. (2017, Agustus 3). *Begini Kesibukan Tim Medis FPU Indonesia di Kamp Pengungsi Sudan*. Diakses Oktober 7, 2022, from detikNews Berita: <https://news.detik.com/berita/d-3585562/begini-kesibukan-tim-medis-fpu-indonesia-di-kamp-pengungsi-sudan>
- Antara. (2022, Mei 21). *Bagaimana Prosedur Hingga Personel Kepolisian Bisa Jadi Pasukan Perdamaian?* Diakses Mei 26, 2022, from News Nasional: <https://www.republika.co.id/berita/rc6abm459/bagaimana-prosedur-hingga-personel-kepolisian-bisa-jadi-pasukan-perdamaian>
- Bangsa-Bangsa, P. (1955). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional*. Jakarta: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Council, S. (2018). *Security Council Elections 2018*. New York: Security Council Report.
- Council, U. N. (1945). *Functions and Powers*. Diakses Juli 8, 2022, from About the Council: <https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE Publications.
- Dagne, T. (2004). *Sudan: The Crisis in Darfur*. USA: Congressional Research Service.

- Danielova, V. (2014). Darfur Crisis of 2003: Analysis of the Darfur Conflict from the Times of First Clashes to the Present Day. *ETHNOLOGIA ACTUALIS*, 37-59.
- Gray, P. S., & et al. (2007). *The Research Imagination An Introduction to Qualitative and Quantitative Methods*. New York: Cambridge University Press.
- Hardiana, P. S. (2021, September 15). *Kiprah Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*. Diakses Maret 3, 2022, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/kiprah-indonesia-pada-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb/>
- Hutabarat, L. F. (2014). Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities. *Jurnal Global & Strategis Universitas Airlangga*, 183-197.
- Indonesia. (2008). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan*. Jakarta: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia. (2015). *Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Luar Negeri Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementrian Luar Negeri.
- Indonesia, K. L. (2019, January 29). *Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*. Diakses Februari 22, 2021, from Isu Khusus: https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb/
- Ishizuka, K. (2002). Peacekeeping and National Interests : Positive Factors Influencing Potential Contributing States . *Kyoei University Journal*, 1-28.

- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, S. (2020, 28). *Dubes RI Khartoum serahkan bantuan dari FPU XI dan IPO Indonesia kepada masyarakat Golo Darfur*. Diakses April 8, 2021, from <https://kemlu.go.id/khartoum/id/news/4753/dubes-ri-khartoum-serahkan-bantuan-dari-fpu-xi-dan-ipo-indonesia-kepada-masyarakat-golo-darfur>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, S. (2020, 29). *Peacekeepers Indonesia di Darfur Kembali Menerima Medali PBB*. Diakses Maret 31, 2021, from <https://kemlu.go.id/khartoum/id/news/4754/peacekeepers-indonesia-di-darfur-kembali-menerima-medali-pbb>
- Kemlu, K. L. (2017). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019*. Jakarta: Kementrian Luar Negeri.
- Kemlu, K. L. (2019, February 27). *Keanggotaan dan Pengambilan Keputusan*. Diakses November 19, 2022, from Beranda: https://kemlu.go.id/portal/id/page/46/keanggotaan_indonesia_pada_dk_pb
b
- Kenkel, K. M. (2013). Five generations of peace operations: from the "thin blue line" to "painting a country blue". *Revista Brasileira de Política Internacional*, 122-143.
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United States of America: SAGE Publications.
- Meiwulan, Y. D. (2022, January 23). Keterlibatan FPU Indonesia pada misi UNAMID. (S. Sastra, Interviewer)
- Mustari, R. H. (2018). *The Contribution of Indonesian National Police and United Nations Departement of Peaekeeping Operations (UNDPKO) in Maintaining Human Security over The Conflict in Darfur, Sudan (2014-2015)*. Bekasi: President University.

- Nations, U. (1945). *Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice*. New York: United Nations.
- Nations, U. (2018). *Troop and Police Contributors*. Diakses Juni 22, 2021, from United Nations Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>
- Nations, U. (n.d.). *Our History*. Diakses February 22 , 2021, from United Nations Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>
- Nations, U. (n.d.). *United Nations Peacekeeping*. Diakses Februari 22 , 2021, from Principles of Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping/>
- Nations, U. (n.d.). *What We Do*. Diakses Maret 1 , 2021, from United Nations Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org/en/what-we-do>
- OCHA. (2021, June 7). *Sudan: Darfur Region Reference Map (As of June 2021)*. Diakses April 1, 2023, from reliefweb.int: <https://reliefweb.int/map/sudan/sudan-darfur-region-reference-map-june-2021>
- Paquin, J. F. (2018). *Foreign Policy Analysis : A Toolbox*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Peacekeeping, U. N. (n.d.). *United Nations Medals*. Diakses Maret 31, 2021, from Our Peacekeepers: <https://peacekeeping.un.org/en/united-nations-medals>
- Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, N. Y. (2016, September 23). *Statement by Vice-President of The Republic of Indonesia at 71st Session of The United Nations General Assembly New York, 23 September 2016*. Diakses September 17, 2022, from Home: <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/read/statement-by-vice-president-of-the-republic-of-indonesia-at-71st-session-of-the-united-nations-general-assembly-new-york-23-september-2016/2496/etc-menu#!>
- Polri, D. H. (2020). *Memory Book of FPU 11 Indonesia*. Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri.

- Polri, M. (2012). *Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri*. Jakarta: Divhubinter Polri.
- Polri, M. (2019). *Laporan Akhir Satuan Tugas Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit 10 Indonesia*. Jakarta: Mabes Polri.
- Review, P. O. (2006). *Annual Review of Global Peace Operations : Sudan Mission Review 2006*. Diakses December 14, 2022, from peace operations review: <https://peaceoperationsreview.org/country-and-regional/sudan-and-south-sudan/>
- Review, P. O. (2008). *Annual Review of Global Peace Operations : Sudan Mission Review 2008*. Diakses December 14, 2022, from peace operations review: <https://peaceoperationsreview.org/country-and-regional/sudan-and-south-sudan/>
- Rights, O. o. (2004). *Report of OHCHR Mission to Chad*. Geneva: Office of the High Commissioner for Human Rights.
- Rosalia, L. (2020). *Kepentingan Indonesia Melalui Indonesian Woman Peacekeepers pada Misi United Nations Interim Force in Lebanon pada Tahun 2015-2019*. Lampung: Universitas Lampung.
- Saragih, H. M. (2021). Indonesian Diplomacy to Become a Non-Permanent Member of the UN Security Council 2019-2020. *International Journal of Arts and Humanities Studies (IAHS)* , 123-128.
- Secretary General, B. B.-G. (1992). *An agenda for peace : preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping : report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992*. New York: UN Department of Public Information.
- Sørensen, R. J. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approaches Fifth Edition*. United Kingdom: Oxford University Press.

Syahputri, R. E. (2018). Identitas dan Kepentingan Indonesia Berpartisipasi dalam UN Peacekeeping Operations pada Era Presiden usilo Bambang Yudhoyono. *Journal of International Relations*, 519-528.

UNAMID. (2014). *UNAMID Mandate*. Diakses Oktober 15, 2022, from About UNAMID Mandate: <https://unamid.unmissions.org/unamid-mandate>

UNDPKO, U. N. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*. New York: United Nations.

Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.